

Overtourism di Destinasi Wisata Utama Indonesia: Studi Kasus Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo

Muhammad Rahmad¹, Kartika Rahman²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

¹ muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id ; ² kartika.rahman@student.stptrisakti.ac.id

Abstrak

Fenomena *overtourism* telah muncul sebagai isu global yang menimbulkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan destinasi pariwisata. Indonesia, sebagai negara dengan potensi wisata bertaraf internasional, turut mengalami permasalahan serupa, terutama di destinasi utama Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Dampak yang muncul meliputi kerusakan lingkungan, tekanan terhadap aspek sosial-budaya, penurunan kualitas pengalaman wisatawan, serta beban pada infrastruktur lokal (Butler & Dodds, 2022; Utama et al., 2024). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor pemicu dan implikasi *overtourism* pada ketiga destinasi tersebut sekaligus mengusulkan solusi yang berlandaskan prinsip pariwisata berkelanjutan. Secara teoretis, kajian ini mengacu pada konsep *Tourism Area Life Cycle* (TALC) dari Butler (2025) untuk memahami dinamika perkembangan destinasi. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa Bali memerlukan diversifikasi produk wisata serta penguatan model pariwisata berbasis komunitas (Lestari et al., 2024; Permatasari, 2022); Yogyakarta membutuhkan perbaikan tata kelola limbah dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Ripno et al., 2021; Nisa & Nuur, 2023); sedangkan Labuan Bajo menitikberatkan pada konservasi ekosistem serta kolaborasi antarpihak (Purwanto et al., 2023; Khadijah et al., 2025). Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus menyediakan rekomendasi praktis bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *overtourism; pariwisata berkelanjutan; kapasitas daya dukung; Tourism Area Life Cycle; Bali; Yogyakarta; Labuan Bajo*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan kekayaan alam, keragaman budaya, serta warisan sejarah yang dimilikinya, Indonesia menjadi destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, perkembangan pesat sektor pariwisata juga menimbulkan tantangan baru, salah satunya adalah fenomena *overtourism*. Fenomena ini terjadi ketika jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi melebihi kapasitas daya dukungnya, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat setempat, dan keberlanjutan destinasi itu sendiri (Butler & Dodds, 2022).

Secara teoretis, fenomena *overtourism* dapat dijelaskan melalui kerangka *Tourism Area Life Cycle* (TALC) yang dikembangkan oleh Butler. Model ini menjelaskan tahapan perkembangan destinasi wisata mulai dari eksplorasi, pengembangan, konsolidasi, hingga kejenuhan dan penurunan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan (Butler, 2025). Dalam konteks tersebut,

pengelolaan destinasi yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah penurunan daya tarik serta kerusakan ekosistem (Fadli et al., 2022). Simbolon et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan wilayah berbasis pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dan sosial.

Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo mewakili tiga destinasi prioritas pariwisata Indonesia yang mengalami tantangan signifikan akibat *overtourism*. Bali, sebagai pusat pariwisata internasional, sering mengalami tekanan lingkungan, sosial-budaya, dan infrastruktur akibat tingginya jumlah wisatawan (Utama et al., 2024; Bellinda & Kusuma, 2024). Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, menghadapi masalah kepadatan wisatawan di kawasan ikonik seperti Malioboro serta isu pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat (Ripno et al., 2021; Nisa & Nuur, 2023). Sementara itu, Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas mengalami tekanan terhadap ekosistem laut dan darat, khususnya di kawasan Taman Nasional Komodo, akibat peningkatan kunjungan tanpa pengendalian yang memadai (Hamdani et al., 2025; Khadijah et al., 2025).

Permasalahan ini menuntut solusi strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penerapan pariwisata berkelanjutan, penguatan peran masyarakat lokal melalui *community-based tourism*, serta penerapan kebijakan tata kelola destinasi yang responsif terhadap kapasitas daya dukung (Lestari et al., 2024; Permatasari, 2022; Purwanto et al., 2023). Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor pemicu dan dampak *overtourism* pada ketiga destinasi utama tersebut; (2) mengidentifikasi strategi mitigasi yang telah diterapkan; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip pariwisata berkelanjutan yang dapat diadaptasi oleh pemangku kepentingan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Overtourism dan Kapasitas Daya Dukung

Overtourism didefinisikan sebagai kondisi ketika jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi melebihi kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) ekologi, sosial, dan infrastrukturnya, sehingga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, komunitas lokal, dan kualitas pengalaman wisata (Butler & Dodds, 2022). Konsep ini berkembang dari perdebatan tentang batas pertumbuhan pariwisata yang dapat ditoleransi tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang destinasi. Bellinda dan Kusuma (2024) menemukan bahwa isu *overtourism* di Bali secara langsung memengaruhi indikator *sustainable tourism*, khususnya dalam dimensi lingkungan dan sosial-budaya, yang memerlukan respons kebijakan yang terkoordinasi.

Kapasitas daya dukung merupakan instrumen kunci dalam pengelolaan *overtourism*. Konsep ini mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan: kapasitas daya dukung fisik-ekologis yang mengukur batas kunjungan tanpa merusak ekosistem; kapasitas daya dukung sosial yang mengidentifikasi ambang toleransi komunitas lokal terhadap kehadiran wisatawan; serta kapasitas daya dukung psikologis yang menentukan batas kenyamanan wisatawan dalam menikmati destinasi (Utama et al., 2024). Sana (2025) menegaskan bahwa strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di destinasi alam Indonesia harus berpijak pada penetapan dan

penegakan ketiga dimensi kapasitas daya dukung ini secara konsisten dan berbasis data empiris.

2.2 Tourism Area Life Cycle (TALC) sebagai Kerangka Analisis

Model *Tourism Area Life Cycle* (TALC) yang dikemukakan oleh Butler (2025) merupakan kerangka teoretis yang paling relevan untuk menganalisis fenomena *overtourism* di destinasi pariwisata Indonesia. Model ini menggambarkan siklus perkembangan destinasi melalui enam tahapan: eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, dan penurunan atau peremajaan. Dalam konteks Indonesia, destinasi-destinasi utama seperti Bali dan Yogyakarta umumnya telah memasuki fase konsolidasi menuju stagnasi, di mana daya tarik masih tinggi namun kapasitas destinasi mulai terlampaui.

Penerapan kerangka TALC membantu pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi posisi suatu destinasi dalam siklus perkembangan dan merumuskan intervensi yang tepat sebelum destinasi memasuki fase penurunan yang lebih parah (Butler, 2024). Fadli et al. (2022) dalam kajian pariwisata berkelanjutan Indonesia mengaitkan TALC dengan kebutuhan regulasi yang adaptif: pada fase konsolidasi, intervensi kebijakan harus bersifat preventif dan berbasis pengendalian pertumbuhan, bukan hanya reaktif terhadap kerusakan yang sudah terjadi.

2.3 Pariwisata Berkelanjutan dan Community-Based Tourism

Pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma pengelolaan yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan penguatan kesejahteraan komunitas lokal. Fadli et al. (2022) mengidentifikasi tiga pilar utama pariwisata berkelanjutan yang relevan dalam konteks Indonesia: pilar ekonomi yang memastikan distribusi manfaat yang merata, pilar lingkungan yang menjaga integritas ekosistem, dan pilar sosial-budaya yang melindungi warisan dan identitas komunitas.

Community-based tourism (CBT) merupakan salah satu pendekatan operasional paling efektif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Permatasari (2022) membuktikan bahwa model CBT di Bali mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, sehingga mengurangi konflik antara kepentingan wisatawan dan komunitas lokal. Nasution dan Primandaru (2023) menambahkan bahwa CBT di Daerah Istimewa Yogyakarta berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Gai et al. (2023) mengidentifikasi tantangan kemiskinan berbasis *sustainable livelihood* di pedesaan sekitar destinasi super prioritas Labuan Bajo sebagai argumen kuat untuk menjadikan CBT sebagai instrumen pemerataan ekonomi, bukan sekadar atraksi wisata tambahan.

2.4 Tata Kelola Destinasi dan Peran Kelembagaan Lokal

Tata kelola destinasi yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas lokal, dan akademisi. Setyawati (2022) dalam kajian peran Dinas Pariwisata DIY menemukan bahwa implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga dan keterbatasan kapasitas teknis di tingkat daerah. Ahzam dan Hariri (2024) mengidentifikasi bahwa konflik kepentingan dalam perkembangan

pariwisata, seperti yang terjadi di Kalurahan Jangkaran Yogyakarta, dapat diminimalkan melalui peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dialog multipihak.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai instrumen kelembagaan yang strategis dalam pengelolaan *overtourism*. Nisa dan Nuur (2023) membuktikan bahwa BUMDes di Desa Wisata Bejiharjo, Gunung Kidul, berhasil memainkan peran krusial dalam membatasi jumlah kunjungan, mengelola alokasi sumber daya, dan memastikan distribusi keuntungan pariwisata yang lebih adil. Muhamad et al. (2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa infrastruktur ekowisata berkelanjutan yang memadai secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola destinasi wisata strategis nasional.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus komparatif terhadap tiga destinasi wisata utama Indonesia: Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Data bersumber dari tinjauan literatur sistematis yang mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, laporan pemerintah, data statistik kunjungan wisata, serta laporan media massa yang dapat diverifikasi, dengan rentang periode 2021–2025.

Pemilihan ketiga destinasi didasarkan pada tiga pertimbangan utama: (1) ketiganya merupakan destinasi prioritas atau super prioritas nasional yang memiliki rekam jejak perkembangan pariwisata yang panjang dan terdokumentasi; (2) ketiganya menunjukkan tanda-tanda *overtourism* yang terdokumentasi dalam literatur akademik; dan (3) ketiganya mewakili konteks yang berbeda—destinasi internasional dewasa (Bali), destinasi warisan budaya (Yogyakarta), dan destinasi super prioritas yang sedang berkembang (Labuan Bajo)—sehingga komparasi di antara ketiganya menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif dan representatif.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi kondisi *overtourism* berdasarkan data kunjungan dan dampak yang terdokumentasi, pemetaan posisi masing-masing destinasi dalam kerangka TALC, serta identifikasi strategi mitigasi yang telah diterapkan dan evaluasi relevansinya berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Triangulasi sumber data dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan kajian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Overtourism di Bali dan Strategi Penanganannya

Bali merupakan destinasi wisata internasional yang telah lama menjadi simbol pariwisata Indonesia. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan penduduk menjadikannya sebagai daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun, tingginya popularitas ini justru menimbulkan masalah serius berupa *overtourism*, yang terlihat dari meningkatnya tekanan pada lingkungan, degradasi budaya, serta menurunnya kualitas pengalaman wisatawan akibat kepadatan kunjungan di kawasan utama seperti Kuta, Ubud, dan Uluwatu (Utama et al., 2024).

Secara kuantitatif, tren kunjungan wisatawan ke Bali menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pascapandemi. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 2,1 juta wisatawan mancanegara

berkunjung ke Bali. Angka ini meningkat drastis menjadi 5,27 juta pada tahun 2023, lalu kembali naik menjadi 6,33 juta pada 2024. Jumlah wisatawan domestik mencapai lebih dari 10 juta orang pada tahun 2024, sehingga total kunjungan mencapai 16 juta (Bali Management Villas, 2025). Ramadanisa et al. (2025) dalam tinjauan literatur tentang strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah di Bali menegaskan bahwa pertumbuhan kunjungan yang tidak terkontrol meningkatkan risiko bencana lingkungan dan sosial yang memerlukan mitigasi terpadu.

Dalam kerangka TALC, Bali saat ini berada pada tahap konsolidasi menuju stagnasi, di mana daya tarik wisata masih tinggi namun kapasitas destinasi telah terlampaui sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif (Butler, 2025). Dampak tersebut meliputi peningkatan volume sampah, konsumsi energi dan air yang berlebihan, polusi, serta ketegangan sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal (Bellinda & Kusuma, 2024). Kurniasari et al. (2024) dalam studi persepsi Generasi Z terhadap pariwisata berkelanjutan di Borobudur—yang juga relevan untuk Bali—menemukan bahwa wisatawan muda semakin kritis terhadap praktik pariwisata yang merusak lingkungan dan budaya, sehingga destinasi yang gagal mengelola *overtourism* berisiko kehilangan segmen pasar strategis ini.

Kasus Desa Wisata Penglipuran di Bangli menawarkan pelajaran berharga tentang pengelolaan *overtourism* berbasis komunitas. Lestari et al. (2024) mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan *overtourism* di Penglipuran dilakukan melalui pembatasan jumlah kunjungan harian, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta pengembangan produk wisata alternatif agar beban kunjungan tidak terpusat pada satu lokasi. Strategi diversifikasi kunjungan ini terbukti mengurangi tekanan pada area inti sekaligus memperluas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat yang lebih luas.

Permatasari (2022) menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat lokal melalui CBT dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi di Bali merupakan kunci untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang. Strategi komprehensif untuk mengatasi *overtourism* di Bali mencakup: penerapan pembatasan jumlah wisatawan berbasis daya dukung yang terukur, diversifikasi produk wisata ke wilayah yang masih kurang dikenal, penguatan regulasi pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif *overtourism* sekaligus mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan di tingkat global (Bellinda & Kusuma, 2024; Fadli et al., 2022).

4.2 Overtourism di Yogyakarta dan Strategi Penanganannya

Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang dikenal akan kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Sebagai daerah istimewa yang berstatus destinasi prioritas, Yogyakarta menerima jumlah kunjungan wisatawan yang sangat besar setiap tahunnya, khususnya di kawasan Malioboro, Keraton, serta kompleks candi Borobudur dan Prambanan. Peningkatan kunjungan ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan *overtourism*, seperti kemacetan, peningkatan produksi sampah, serta penurunan kualitas lingkungan dan pengalaman wisata (Ripno et al., 2021).

Data terkini menunjukkan lonjakan kunjungan yang signifikan. Pada masa libur Lebaran 2025, tiga taman wisata candi utama—Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko—dikunjungi sebanyak 182.219 wisatawan, meningkat sekitar 25% dibandingkan periode Lebaran tahun 2024 (PT Taman Wisata Candi, 2025). Selama libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, jumlah pengunjung Candi Borobudur mencapai rata-rata 10.000–11.000 orang per hari (Metrotvnews, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa tekanan wisata di Yogyakarta tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga berulang pada setiap periode liburan besar. Kurniasari et al. (2024) dalam studi persepsi wisatawan terhadap pariwisata berkelanjutan Borobudur mengidentifikasi bahwa pengunjung mulai merasakan penurunan kualitas pengalaman wisata akibat kepadatan yang berlebihan, terutama pada musim puncak kunjungan.

Dalam kerangka TALC, kondisi Yogyakarta dapat dikategorikan berada pada tahap konsolidasi menuju kejenuhan, di mana popularitas destinasi sangat tinggi namun kapasitas daya dukung lingkungan dan infrastruktur mulai mengalami tekanan serius (Butler, 2025). Muhamad et al. (2025) menyoroti bahwa permasalahan infrastruktur dalam konteks ekowisata berkelanjutan memengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah daerah, sehingga tanpa pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan, lonjakan jumlah wisatawan berpotensi menurunkan daya tarik destinasi dalam jangka panjang.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu lingkungan yang paling mendesak. Volume sampah mengalami peningkatan signifikan pada musim puncak kunjungan, sementara sistem pengelolannya masih belum berjalan secara optimal (Ripno et al., 2021). Hafifi (2024) dalam kajian pengelolaan sampah di Destinasi Super Prioritas Mandalika memberikan referensi komparatif yang relevan: pendekatan terpadu yang mengintegrasikan teknologi pengelolaan sampah modern dengan partisipasi aktif komunitas lokal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down yang hanya mengandalkan kapasitas pemerintah.

Pada tingkat desa wisata, BUMDes terbukti menjadi instrumen pengelolaan *overtourism* yang efektif. Nisa dan Nur (2023) menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Wisata Bejiharjo, Gunung Kidul, berhasil membatasi jumlah kunjungan, mengelola alokasi sumber daya, dan memastikan distribusi keuntungan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat setempat. Ahzam dan Hariri (2024) menambahkan bahwa resolusi konflik kepentingan antara pengembangan pariwisata dan kepentingan komunitas lokal di Yogyakarta sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa sebagai mediator yang netral dan berkeadilan.

Nasution dan Primandaru (2023) menegaskan bahwa pendekatan CBT di DIY berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi prioritas yang dapat diterapkan meliputi: (1) pembatasan kapasitas pengunjung di objek wisata budaya utama selama musim puncak; (2) penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); (3) perbaikan dan perluasan infrastruktur publik, termasuk transportasi, area parkir, dan sanitasi; serta (4) pemberdayaan komunitas lokal melalui BUMDes dan desa wisata agar manfaat ekonomi pariwisata lebih merata (Setyawati, 2022; Nasution & Primandaru, 2023).

4.3 Overtourism di Labuan Bajo dan Strategi Penanganannya

Labuan Bajo, sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, telah mengalami lonjakan signifikan dalam aktivitas pariwisata, khususnya di sektor wisata bahari dan kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Statusnya sebagai pintu gerbang menuju habitat satwa endemik komodo menjadikan Labuan Bajo magnet utama bagi wisatawan internasional. Pertumbuhan pesat ini menimbulkan berbagai permasalahan serius *overtourism* dari segi ekologi, sosial-budaya, maupun pengelolaan destinasi.

Menurut data dari InfoLabuanBajo (2025), sepanjang tahun 2024 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo mencapai 413.349 orang, terdiri dari 229.763 wisatawan mancanegara dan 181.586 wisatawan domestik. Taman Nasional Komodo menjadi destinasi favorit dengan 334.206 pengunjung. Pada awal tahun 2025, tren kunjungan tetap positif dengan total 58.926 wisatawan hingga bulan April. Jumlah kapal wisata asing yang memasuki perairan Labuan Bajo pada semester pertama 2025 mencapai 45 kapal, melampaui total sepanjang 2024 yang berjumlah 42 kapal (Tempo, 2025). Hamdani et al. (2025) mendokumentasikan efek berganda pariwisata terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, namun juga mengidentifikasi bahwa lonjakan jumlah wisatawan menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem laut, infrastruktur, sektor perikanan lokal, dan kapasitas layanan publik.

Dari aspek lingkungan, aktivitas wisata bahari yang tidak terkontrol berpotensi mempercepat kerusakan terumbu karang, degradasi ekosistem laut, serta mengganggu satwa endemik. Purwanto et al. (2023) menekankan pentingnya penerapan prinsip pariwisata bertanggung jawab dan konservasi sebagai solusi utama, termasuk melalui program WWF Signing Blue yang mengintegrasikan standar pariwisata bahari berkelanjutan dengan penegakan hukum yang konsisten. Khadijah et al. (2025) dalam kajian pengembangan wisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo menemukan bahwa strategi konservasi ekosistem darat yang melibatkan komunitas lokal sebagai penjaga kawasan terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan konservasi yang bersifat eksklusif dan tidak partisipatif. Sana (2025) memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang terintegrasi, kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dapat bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Dampak sosial-budaya juga semakin nyata. Peningkatan investasi pariwisata menyebabkan kenaikan harga tanah dan properti, sehingga masyarakat lokal kesulitan mengakses sumber daya yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gai et al. (2023) mengidentifikasi bahwa kondisi kemiskinan berbasis *sustainable livelihood* di pedesaan sekitar Labuan Bajo masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor, mengingat pergeseran orientasi ekonomi yang terlalu terfokus pada pariwisata berisiko melemahkan sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian.

Jika ditinjau melalui kerangka TALC, Labuan Bajo dapat dikategorikan sudah memasuki tahap konsolidasi menuju kejenuhan, terutama di wilayah laut dan pulau utama Komodo dan Rinca (Butler, 2025). Tanpa regulasi yang ketat, kondisi ini dapat mempercepat penurunan daya tarik destinasi dan kualitas pengalaman wisatawan. Sejumlah strategi untuk menjawab tantangan *overtourism* di Labuan Bajo, sebagian di antaranya mulai diterapkan, meliputi: (1) pembatasan kuota wisatawan ke Pulau Komodo dan Padar guna menjaga daya dukung satwa dan ekosistem (Sana, 2025); (2) pengaturan jumlah dan jadwal sandar kapal wisata agar tidak terjadi

penumpukan yang berpotensi merusak habitat laut; (3) pelaksanaan program WWF Signing Blue untuk wisata bahari bertanggung jawab (Purwanto et al., 2023); (4) diversifikasi destinasi wisata ke desa wisata di daratan Flores; (5) penguatan infrastruktur ramah lingkungan; serta (6) pemberdayaan masyarakat lokal melalui homestay, desa wisata, dan usaha berbasis komunitas (Hamdani et al., 2025; Khadijah et al., 2025).

4.4 Analisis Komparatif dan Pola Lintas Destinasi

Perbandingan ketiga kasus mengungkapkan pola umum *overtourism* di destinasi prioritas Indonesia yang memiliki implikasi kebijakan penting. Pertama, ketiga destinasi menunjukkan karakteristik tahap konsolidasi menuju stagnasi dalam kerangka TALC, dengan intensitas dan bentuk dampak yang berbeda sesuai konteks masing-masing (Butler, 2025). Kedua, ketiga destinasi menunjukkan ketidakseimbangan distribusi kunjungan—di mana beban wisata terkonsentrasi pada beberapa titik ikonik—yang memerlukan strategi diversifikasi kunjungan yang terencana dan sistematis.

Ketiga, analisis lintas kasus mengonfirmasi bahwa intervensi berbasis komunitas, baik melalui CBT, BUMDes, maupun keterlibatan langsung dalam pengelolaan kawasan, secara konsisten menghasilkan dampak positif yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan regulasi top-down semata (Permatasari, 2022; Nisa & Nuur, 2023; Khadijah et al., 2025). Keempat, penerapan kapasitas daya dukung sebagai instrumen pengelolaan masih menghadapi tantangan implementasi di ketiga destinasi, terutama dalam hal ketersediaan data yang memadai, penegakan regulasi, dan koordinasi antarlembaga (Utama et al., 2024; Sana, 2025). Fadli et al. (2022) mengidentifikasi bahwa gap antara kebijakan pariwisata berkelanjutan yang diadopsi secara formal dan implementasinya di lapangan masih merupakan hambatan utama yang harus diatasi melalui reformasi kapasitas kelembagaan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Fenomena *overtourism* yang terjadi di Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo menunjukkan bahwa pariwisata massal di Indonesia telah memasuki tahap kritis dalam siklus TALC. Meskipun ketiga destinasi ini menghadapi tekanan yang berbeda dalam konteks dan intensitasnya, pola yang muncul serupa: lonjakan jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas daya dukung destinasi sehingga menimbulkan dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial-budaya, dan infrastruktur.

Di Bali, *overtourism* terlihat dari tingginya kepadatan kunjungan pascapandemi yang mencapai 16 juta wisatawan pada 2024, memicu kerusakan lingkungan, polusi, dan degradasi budaya (Bellinda & Kusuma, 2024; Utama et al., 2024). Di Yogyakarta, permasalahan muncul dalam bentuk penumpukan wisatawan di kawasan ikonik yang berdampak pada peningkatan sampah, kemacetan, dan tekanan infrastruktur (Ripno et al., 2021; Kurniasari et al., 2024). Di Labuan Bajo, lonjakan wisatawan ke Taman Nasional Komodo dan aktivitas wisata bahari yang kurang terkontrol berpotensi merusak ekosistem laut serta menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat (Hamdani et al., 2025; Sana, 2025).

Setiap destinasi telah mengembangkan strategi mitigasi yang kontekstual: Bali menekankan diversifikasi produk wisata dan penguatan CBT; Yogyakarta mendorong pengelolaan sampah terpadu, pembatasan kapasitas, dan pemberdayaan BUMDes; sedangkan Labuan Bajo fokus pada pembatasan kuota wisatawan, pengaturan jadwal kapal wisata, dan konservasi ekosistem laut melalui program kolaboratif (Purwanto et al., 2023; Nisa & Nuur, 2023; Lestari et al., 2024).

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis lintas kasus, artikel ini merumuskan tiga rekomendasi kebijakan utama untuk pengelolaan *overtourism* di Indonesia. Pertama, penerapan sistem monitoring kapasitas daya dukung yang berbasis data real-time dan terintegrasi antarlevel pemerintahan, sehingga keputusan pembatasan kunjungan dapat dilakukan secara responsif dan berbasis bukti empiris, bukan reaktif terhadap kerusakan yang sudah terjadi (Sana, 2025; Fadli et al., 2022). Kedua, kelembagaan lokal—khususnya BUMDes dan kelompok sadar wisata—perlu diperkuat kapasitasnya sebagai garda terdepan pengelolaan *overtourism*, dengan dukungan anggaran, pendampingan teknis, dan kewenangan regulasi yang memadai dari pemerintah daerah (Nisa & Nuur, 2023; Ahzam & Hariri, 2024). Ketiga, diversifikasi destinasi secara terencana perlu didukung oleh investasi infrastruktur yang proporsional di destinasi-destinasi alternatif, sehingga beban kunjungan dapat didistribusikan lebih merata dan pemanfaatan keanekaragaman potensi wisata Indonesia menjadi lebih optimal (Simbolon et al., 2025; Hamdani et al., 2025).

5.3 Keterbatasan dan Penelitian Ke Depan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan data sekunder dan analisis berbasis literatur yang tidak mencakup pengukuran lapangan secara langsung. Penelitian mendatang sangat disarankan untuk mengembangkan metodologi kuantitatif guna mengukur kapasitas daya dukung destinasi secara presisi, mengembangkan indikator *sustainability* yang dapat diimplementasikan secara praktis, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan *overtourism* yang sudah berjalan melalui kajian longitudinal. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan komunitas lokal merupakan prasyarat mutlak untuk membangun model pengelolaan pariwisata Indonesia yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan sosial bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Ahzam, M. S., & Hariri, A. (2024). Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik perkembangan pariwisata: Kasus Kalurahan Jankaran Yogyakarta. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 17–30.
- Bali Management Villas. (2025, July 24). *Statistik pariwisata Bali: Kunjungan wisatawan pada tahun 2025*. Bali Management Villas.
- Bellinda, N. P. W. N. B., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). Pengaruh isu *overtourism* terhadap sustainable tourism yang ada di Bali. *Akuntansi* 45, 5(2), 348–359.

Butler, R. W., & Dodds, R. (2022). Overcoming overtourism: A review of failure. *Tourism Review*, 77(1), 35–53.

Butler, R. (2024). *Siklus hidup kawasan pariwisata: Tinjauan, relevansi, dan revisi*. Routledge.

Butler, R. (2025). Pengembangan destinasi pariwisata: Model siklus hidup kawasan pariwisata. *Geografi Pariwisata*, 27(3–4), 599–607.

Fadli, M., Susilo, E., Puspitawati, D., Ridjal, A. M., Maharani, D. P., & Liemanto, A. (2022). Sustainable tourism as a development strategy in Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*, 10(1).

Gai, A. M., Witjaksono, A., Sai, S. S., Wulandari, L. K., Jenahu, G. R., Levigo, V., & Antonius, P. (2023). Kemiskinan berbasis sustainable livelihood di pedesaan sekitar destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. *Prosiding SEMSINA*, 4(2), 96–100.

Hafifi, M. K. (2024). Pengelolaan sampah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi super prioritas-KEK Mandalika. *Tourism, Hospitality and Culture Insights Journal*, 4(1), 29–41.

Hamdani, A. T., Rachmawati, D., DC, Y. P. P. W., Ayu, J. P., & Raif, S. A. (2025). Analisis multiplier effect pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 66–79.

InfoLabuanBajo. (2025, April 14). *Statistik kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo 2024*. InfoLabuanBajo. <https://infolabuanbajo.id/2025/04/14/statistik-kunjungan-wisatawan-ke-labuan-bajo-2024/>

Khadijah, S. A. R., Ayu, J. P., DC, Y. P. P. W., Hamdani, A. R. T., & Rachmawati, D. (2025). Pengembangan wisata berkelanjutan dan konservasi ekosistem darat di Taman Nasional Komodo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 79–98.

Kurniasari, K. K., Perdana, B. E. G., Putra, R. A. S., & Iban, C. (2024). Persepsi Generasi Z terhadap pariwisata berkelanjutan pada destinasi budaya: Studi kasus Borobudur. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 8(1), 11–24.

Lestari, M. N. D., Dewi, N. P. D. U., & Sari, I. G. A. P. N. (2024). Analisis penanggulangan overtourism pada daya tarik wisata Penglipuran Bangli guna mewujudkan sustainable tourism. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 5(2), 131–144.

Metrotvnews. (2025). *Pengunjung Candi Borobudur mencapai rata-rata 10.000–11.000 orang per hari saat libur Natal dan Tahun Baru*. Metrotvnews.

Muhamad, M., Ahmad, A. B., & Supriyadi, H. (2025). Pengaruh infrastruktur ekowisata berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah daerah di kawasan wisata strategis nasional Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 9(1), 292–312.

Nasution, O. B., & Primandaru, N. (2023). Kajian dampak pariwisata berbasis masyarakat sebagai pendukung sustainable development terhadap peningkatan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 4(2), 173–183.

Nisa, K., & Nuur, A. (2023). Peran BUMDes dalam mengatasi over tourism di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 1(1), 10–18.

Permatasari, I. (2022). Peran model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164–171.

PT Taman Wisata Candi. (2025, April 7). *Sebanyak 182 ribu wisatawan mengunjungi Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko di masa libur Lebaran 2025*. In Journey Destination.

Purwanto, D., Semara, I. M. T., & Sutiarso, M. A. (2023). Analisis implementasi program WWF Signing Blue berlandaskan konsep pariwisata bertanggung jawab pada wisata bahari Labuan Bajo. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 2(2), 327–336.

Ramadanisa, A. N., Zalianti, J. M., & Yusri, Y. (2025). Strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan gunungapi Karangasem Bali: Review literatur (2020–2024). *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 153–169.

Ripno, R., Nathalia, T. C., & Pramomo, R. (2021). Pengelolaan sampah dalam mendukung pariwisata berkelanjutan: Studi kasus destinasi wisata Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Internasional Sosial, Kebijakan, dan Hukum*, 2(2), 1–4.

Sana, I. N. L. (2025). Strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan di destinasi wisata alam Indonesia. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), 24–36.

Setyawati, N. (2022). *Peran Dinas Pariwisata DIY dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan [Disertasi]*. STPMD "APMD".

Simbolon, F. B., Harmain, U., & Sinurat, A. (2025). Pengembangan wilayah berbasis pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2153–2161.

Tempo. (2025). *Turis Labuan Bajo lebih banyak menginap di kapal daripada hotel*. Tempo. <https://www.tempo.co/hiburan/turis-labuan-bajo-lebih-banyak-menginap-di-kapal-daripada-hotel-1294663>

Utama, I. G. B. R., Suardhana, I. N., Sutarya, I. G., & Krismawintari, N. P. D. (2024). Menilai dampak pariwisata berlebih di Bali: Perspektif lingkungan, sosial budaya, dan

ekonomi terhadap pariwisata berkelanjutan. *TourismSpectrum: Diversity & Dynamics*, 1(2), 10–56578.